



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022**

**Sarilamak, 02 September 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2022. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan urusan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari pemangku kepentingan terkait. Untuk itu atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dalam penyajian Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan perencanaan di masa mendatang.

Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, 02 September 2022

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
HARMEN, SH  
NIP.19670816 199308 1 001



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022  
dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 41).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2022;
  - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
  - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2022.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2022.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 02 September 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 46



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERATURAN BUPATI LIMA PULUH NOMOR 46 TAHUN 2022.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021</b>	<b>II-6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun 2021.....	II-6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-20
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	II-23
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-31
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL</b>	<b>III-35</b>
3.1 Indikator Kinerja.....	III-35
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	III-36
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>IV-56</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<b>: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan 2021.....</b>	<b>II- 9</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....</b>	<b>II- 22</b>
<b>Tabel 2.3.1</b>	<b>: Data Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....</b>	<b>II- 24</b>
<b>Tabel 2.3.2</b>	<b>: SWOT Analisa Internal dan Eksternal.....</b>	<b>II- 27</b>
<b>Tabel 2.3.3</b>	<b>: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT dan Matrik SWOT .....</b>	<b>II- 28</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>: Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota .....</b>	<b>II- 32</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>: Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD.....</b>	<b>III-35</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>: Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota .....</b>	<b>III-37</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, serta menindaklanjuti amanat pasal 343-368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Maka setiap Perangkat Daerah (PD) melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja (PD) tahun 2022 berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan melakukan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja, pagu indikatif dan lain terkait lainnya berdasarkan data yang ditetapkan di dalam perkara perubahan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017, Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, merupakan dokumen wajib yang harus disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Ayat menyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan: a.) Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan b.) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya Pasal 358 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Perubahan RKPD Tahun 2022 berdampak pada perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032

- (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
  19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);
  20. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 antara lain:

1. Menjabarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
2. Menyediakan Dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022.
3. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Sosial pada tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi Gambaran Umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Sosial sampai Triwulan II Tahun 2022 , yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan sebagainya.
- III. Rencana Kerja Dinas Sosial Dinas Sosial berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan Pendanaan tahun 2022.
- IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi : 1) Penyusunan perencanaan, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing - masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional.
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah tahun 2022 (RKPD tahun 2022) adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2022 dengan RPJMD tahun 2021-2026 dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **Pelaksanaan Evaluasi sampai triwulan II**

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam RKPD tahunan. Visi dari pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah “MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 Misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi listas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daeah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022, melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dan di Perubahan Renja ini Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2022 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Evaluasi Rencana Kerja sampai triwulan II juga memperhatikan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2022 dapat melihat seberapa jauh tingkat capaian yang dapat dicapai oleh perangkat daerah.

Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2022 yaitu sebanyak 5 program, 9 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.119.773.848,- . Sampai triwulan II telah terjadi pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Pergeseran I tanggal 18 April 2022 dan pergeseran II tanggal 29 Juni 2022 namun tidak merubah dari anggaran Dinas Sosial. Realisasi capaian kinerja yang dilakukan sampai dengan Bulan Juni tahun 2022 (triwulan II) yaitu sebesar 31,75% realisasi keuangan dan 32,23 % realisasi Fisik.

Adapun Capaian Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 sampai Triwulan ke II dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 (Formulir E.81)

Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten  
Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota  
Periode Pelaksanaan : 2022

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Prorgam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5 x 100 %	15										
		Urusan Wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	39.601.203.290	95%	3.729.871.502	95%	3.271.914.948		416.520.962		1.438.281.525		0	1.854.802.487	95%	5.584.673.989	100	14	Dinas Sosial			
	Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	488.329.000	95%	28.671.000	95%	16.191.000		-		10.937.000		0	10.937.000	95%	39.608.000	100	8	Dinas Sosial			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12	102.000.000	2	5.601.000	6	4.687.000		-	5	3.008.000		5	3.008.000	7	8.609.000	58,33	8	Dinas Sosial			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6	63.000.000	1	1.877.000	0	-		-	-	-		0	-	1	1.877.000	16,67	3	Dinas Sosial			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6	58.500.000	1	1.877.000	0	-		-	-	-		0	-	1	1.877.000	16,67	3	Dinas Sosial			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6	58.500.000	1	1.917.000	0	-		-	-	-		0	-	1	1.917.000	16,67	3	Dinas Sosial			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6	58.500.000	1	1.904.000	0	-		-	-	-		0	-	1	1.904.000	16,67	3	Dinas Sosial			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72	102.829.000	10	11.110.000	15	9.554.000		-	12	7.929.000		12	7.929.000	22	19.039.000	30,56	19	Dinas Sosial			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516	45.000.000	61	4.385.000	12	1.950.000		-	-	-		0	-	61	4.385.000	11,82	10	Dinas Sosial			

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	27.317.093.190	95%	2.884.784.986	95%	2.762.638.048		416.520.962		1.317.505.625		0	1.734.026.587	95%	4.618.811.573	100	17	Dinas Sosial
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72	26.983.854.690	12	2.875.041.986	12	2.747.990.048	3	416.520.962	2	1.316.895.625		5	1.733.416.587	17	4.608.458.573	23,61	17	Dinas Sosial
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72	223.903.500	12	2.665.000	0	-		-				0	-	12	2.665.000	16,67	1	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	33.889.000	1	2.337.000	1	2.198.000		-				0	-	1	2.337.000	16,67	7	Dinas Sosial
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	27.000.000	0	-	0			-				0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	23.995.000	12	2.805.000	12	2.350.000		-	6	610.000		6	610.000	18	3.415.000	25,00	14	Dinas Sosial
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	24.451.000	1	1.936.000	0	-		-				0	-	1	1.936.000	16,67	8	Dinas Sosial
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	43.376.000	95%	4.125.000	-	-		-				0	-	95%	4.125.000	100	10	Dinas Sosial
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPMBMD	12	21.585.000	2	1.953.000	0	-		-				0	-	2	1.953.000	16,67	9	Dinas Sosial
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12	21.791.000	3	2.172.000	0	-		-				0	-	3	2.172.000	25	10	Dinas Sosial

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	269.976.000	95%	-	-	-	-	-	-	0	-	95%	-	100	-	Dinas Sosial
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420	210.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	59.976.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	2.464.758.100	95%	182.660.500	95%	114.473.900	-	23.559.500	-	0	23.559.500	95%	206.220.000	100	8	Dinas Sosial
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	72	84.999.000	12	5.872.000	12	4.107.000	-	6	1.022.000	6	1.022.000	18	6.894.000	25,00	8	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	66.000.000	12	-	0	-	-	-	-	0	-	12	-	16,67	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	66.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72	241.067.300	12	34.068.500	12	40.381.200	-	6	8.898.000	6	8.898.000	18	42.966.500	25,00	18	Dinas Sosial
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	235.855.800	12	30.227.000	12	21.731.700	-	6	2.810.000	6	2.810.000	18	33.037.000	25,00	14	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72	47.450.000	12	4.740.000	0	-	-	-	-	0	-	12	4.740.000	16,67	10	Dinas Sosial
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598	154.010.000	614	16.892.500	400	7.000.000	-	37	1.003.200	37	1.003.200	651	17.895.700	11,63	12	Dinas Sosial

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan	5402	1.569.376.000	115	90.860.500	688	41.254.000	-	59	9.826.300					59	9.826.300	174	100.686.800	3,22	6	Dinas Sosial
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	4.146.044.000	95%	98.922.550	0%	-	-	-	-					0	-	95%	98.922.550	100	2	Dinas Sosial
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	450.000.000	0	-	0	-	-	-	-					0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	9	1.775.344.000	3	49.422.550	0	0	-	-	-					0	-	3	49.422.550	33,33	3	Dinas Sosial
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	55	225.000.000	3	15.000.000	0	-	-	-	-					0	-	3	15.000.000	5,45	7	Dinas Sosial
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	30	695.700.000	6	34.500.000	0	-	-	-	-					0	-	6	34.500.000	20	5	Dinas Sosial
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	500.000.000	0	-	0	-	-	-	-					0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	500.000.000	0	-	0	-	-	-	-					0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	2.029.100.000	95%	267.307.025	95%	172.430.000	-	-	45.139.847					0	45.139.847	95%	312.446.872	100	15	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	54.690.000	12	917.000	0	-	-	-	-					0	-	12	917.000	16,67	2	Dinas Sosial

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72	345.420.000	12	31.200.025	12	65.000.000	-	6	9.139.847	6	9.139.847	18	40.339.872	25,00	12	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	45.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72	1.583.990.000	12	235.190.000	12	107.430.000	-	6	36.000.000	6	36.000.000	18	271.190.000	25,00	17	Dinas Sosial
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>2.842.527.000</b>	<b>95%</b>	<b>263.400.441</b>	<b>95%</b>	<b>216.282.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.139.553</b>	<b>0</b>	<b>41.139.553</b>	<b>95%</b>	<b>304.539.994</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>Dinas Sosial</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	211.626.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72	1.510.797.000	12	189.631.373	12	208.332.000	-	6	40.604.553	6	40.604.553	18	230.235.926	25,00	15	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72	96.240.000	12	8.815.000	12	7.950.000	-	6	535.000	6	535.000	18	9.350.000	25,00	10	Dinas Sosial
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6	823.864.000	1	64.954.068	0	-	-	-	-	0	-	1	64.954.068	16,67	8	Dinas Sosial
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	200.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
II	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang di Berdayakan</b>	<b>95%</b>	<b>13.560.561.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.133.914.680</b>	<b>95%</b>	<b>1.428.599.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.493.000</b>	<b>0</b>	<b>118.493.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.252.407.680</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>Dinas Sosial</b>
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>95%</b>	<b>13.560.561.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.133.914.680</b>	<b>95%</b>	<b>1.428.599.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.493.000</b>	<b>0</b>	<b>118.493.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.252.407.680</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>Dinas Sosial</b>

III	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81	2.511.609.000	81	252.138.200	0	-	-	0	-	81	252.138.200	100	10	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13	932.242.500	13	84.157.400	13	91.000.000	-	13	19.500.000	13	19.500.000	26	103.657.400	200	11	Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi, Pemberdayaan Masyarakat (RLTH), Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	456	3.215.660.000	26	455.808.300	111	961.000.000	-	0	40.748.000	26	496.556.300	5,70	15	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	104	6.051.491.300	132	300.516.280	8	376.599.900	-	2	58.245.000	134	358.761.280	128,85	6	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	66	849.558.200	11	41.294.500	0	-	-	0	-	11	41.294.500	16,67	5	Dinas Sosial		
		<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>25%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>Dinas Sosial</b>		
		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>25%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>Dinas Sosial</b>		
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6	450.000.000	0	-	0	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial		



	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	26.642.853.800	85%	2.017.577.183	85%	311.000.000									0	41.102.900	85%	2.058.680.083	100		8	Dinas Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	22.543.488.800	85%	1.882.744.253	85%	311.000.000									0	41.102.900	85%	1.923.847.153	100		9	Dinas Sosial	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	12152	13.724.705.300	1912	1.474.463.033	263	262.000.000									0	41.102.900	1912	1.515.565.933	15,73		11	Dinas Sosial	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596	1.194.416.500	88	104.552.925	0	0									0	-	88	104.552.925	14,77		9	Dinas Sosial	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528	1.476.209.500	80	63.035.300	0	-									0	-	80	63.035.300	15,15		4	Dinas Sosial	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	360	447.632.000	53	24.498.200	40	17.000.000									0	-	53	24.498.200	14,72		5	Dinas Sosial	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas. Tersedianya Rumah Idaman ULS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	274	2.146.194.500	23	153.340.695	10	10.000.000									0	-	23	153.340.695	8,39		7	Dinas Sosial	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150	900.000.000	0	-	0	-									0	-	0	-	0,00		-		Dinas Sosial

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480	1.374.685.000	43	19.027.500	20	7.000.000	-	-	0	-	43	19.027.500	8,96	1	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30	123.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30	123.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169	1.033.646.000	15	43.826.600	15	15.000.000	-	-	0	-	15	43.826.600	8,88	4	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%	4.099.365.000	85%	134.832.930	85%	-	-	-	0	-	85%	134.832.930	100	3	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180	165.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180	165.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90	150.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140	1.332.480.000	13	64.596.830	0	-	-	-	0	-	13	64.596.830	9,29	5	Dinas Sosial

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	212391	1.028.450.000	193844	70.236.100	0	-	-	-	-	-	-	0	-	193.844	70.236.100	91.267521	7	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	159	358.435.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>85%</b>	<b>9.989.848.600</b>	<b>85%</b>	<b>768.685.600</b>	<b>85%</b>	<b>44.994.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>10.535.000</b>	<b>85%</b>	<b>779.220.600</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>Dinas Sosial</b>
	Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	880.000.000	85%	-	85%	-	-	-	-	-	-	0	-	85%	-	100	-	Dinas Sosial
	Penjangkauan Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108	225.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130	345.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156	310.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	Dinas Sosial

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	9.109.848.600	95%	768.685.600	95%	44.994.000	-	10.535.000	0	10.535.000	95%	779.220.600	100	9	Dinas Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13	2.461.734.600	13	228.045.800	13	16.000.000	-	3.870.000	7	3.870.000	20	231.915.800	153,84615	9	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24994	887.854.900	25287	78.893.200	0	-	-	-	0	-	25287	78.893.200	101,17	9	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16898	2.070.546.300	17130	125.798.600	13	15.994.000	-	3.735.000	13	3.735.000	17143	129.533.600	101,45	6	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	564	3.689.712.800	54	335.948.000	12	13.000.000	-	2.930.000	6	2.930.000	60	338.878.000	10,64	9	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	3.612.297.000	100%	86.779.364	100%	63.265.000	-	17.327.000	0	17.327.000	100%	104.106.364	100	3	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	2.458.829.900	95%	44.289.364	95%	63.265.000	-	17.327.000	0	17.327.000	95%	61.616.364	100	3	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	859	1.147.199.900	84	42.039.933	126	52.620.000	-	15.967.000	54	15.967.000	138	58.006.933	16,07	5	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900	543.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	500.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlanjar dalam perjalanan	72	86.000.000	0	-	6	6.625.000	-	210.000	1	210.000	1	210.000	1,39	0	Dinas Sosial
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan seller Pengungsi	83	182.630.000	5	2.249.431	36	4.020.000	-	1.150.000	7	1.150.000	12	3.399.431	14,46	2	Dinas Sosial

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%	1.153.467.100	95%	42.490.000	95%	-	-	-	-	-	-	-	0	-	95%	42.490.000	100	4	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	7	600.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150	553.467.100	25	42.490.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	25	42.490.000	16,67	8	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	1.107.548.100	95%	94.433.000	95%	-	-	-	-	-	-	-	0	-	95%	94.433.000	100	9	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95%	1.107.548.100	95%	94.433.000	95%	-	-	-	-	-	-	-	0	-	95%	94.433.000	100	9	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	12	689.548.100	2	76.433.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	76.433.000	16,67	11	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	300.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	Dinas Sosial
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72	118.000.000	12	18.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	12	18.000.000	16,67	15	Dinas Sosial

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dan anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga negara atau gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.

5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada tabel II.2 berikut ini :

Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1.	Jumlah Peningkatan SDM PSM dan TKSK		√	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	60 %	80 %	90 %	100 %	
2.	Jumlah Pembentukan Kube -FM Penumbuhan dan Pemberdayaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan usaha Kube-FM		√	13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	60 %	80 %	90 %	100 %	
3.	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita KTK dan WRSE		√	65 orang	38 orang	65 orang	65 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
4.	Jumlah Pelaksanaan Verivali Data BDT		√	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	60 %	80 %	90 %	100 %	
5.	Jumlah Bantua Permakanan Lansia terlanjar, Lansia Tidak Potensial dan Bantuan UEP bagi Lansia Produktif	√	√	2.452 orang	2.616 orang	2.616 orang	2.616 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
6.	Jumlah Peningkatan SDM bagi PSKS		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
7.	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional		√	17.874 Data PBI JKSS dan 139.728 PBI JKN	17.874 Data PBI JKSS dan 140.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	60 %	80 %	90 %	100 %	
8.	Jumlah Pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH)		√	4.377.954 Kg Rastra/8.086 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.371 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.271 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.171 KPM PKH	60 %	80 %	90 %	100 %	
9.	Jumlah Pendistribusian Bantuan Tanggap Darurat terlaksananya peningkatan kemampuan anggota Tagana serta Pembinaan terhadap Daerah yang rawan konflik sosial	√	√	13 kecamatan, 30 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	60 %	80 %	90 %	100 %	
10.	Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan dan Pengiriman anak Terlantar	√	√	50 orang	30 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
11.	Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar Yang Mengikuti Bimtek		√	24 orang	18 orang	24 orang	24 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Pengiriman ke panti Rehap	√	√	27 orang	16 Orang	25 orang	25 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
13.	Jumlah Anak Disabilitas Yang Mengikuti Bimtek dan Mendapat Bantuan	√	√	30 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
14.	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sandang Bagi Anak asuh Dalam Panti	√	√	360 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	60 %	80 %	90 %	100 %	
15.	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP		√	15 orang	15 orang	20 orang	20 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
16.	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek dan Menerima Bantuan UEP		√	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	40 %	60 %	80 %	80 %	
17.	Jumlah LKKS, LK3 dan Pelatihan Pos Daya		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
18.	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Peran dan fungsi kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1  
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung

14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”** Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai- nilai keagamaan. Dan Misi ke-4 meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk

dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas,

sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

**Tabel 2.3.2**

**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

<b>KEKUATAN (Strengths)</b>		<b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b>	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

<b>PELUANG (Opportunities)</b>		<b>ANCAMAN (Threats)</b>	
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial

O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS		
----	--	--	--

Tabel 2.3.3

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT**  
**(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (Strengths)</b>	<b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial</li> <li>➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi</li> <li>➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang</li> <li>➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi</li> <li>➤ Keterbatasan anggaran</li> <li>➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang</li> <li>➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan</li> </ul>
<b>EKSTERNAL</b>	<b><u>STRATEGI S + O</u></b>	<b><u>STRATEGI W + O</u></b>
<b>PELUANG (Opportunities )</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial</li> <li>➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial</li> <li>➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>➤ Meningkatkan kesejahteraan PMKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial</li> <li>➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).</li> <li>➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi</li> <li>➤ Jaringan kerja lembaga pemerin-tah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional</li> <li>➤ Adanya kesempat-an untuk mening-katkan kualitas PMKS</li> </ul>		

		kualitas PMKS
<p><b>ANCAMAN (Threats)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwa-wasan lingkungan</li> </ul>	<p><b><u>STRATEGI S + T</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana</li> </ul>	<p><b><u>STRATEGI W + T</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> </ul>

**1. Strategi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :**

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PMKS

**2. Strategi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :**

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS

### 3. Strategi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

### 4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PMKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial



## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2022, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 disajikan pada tabel II.5 berikut :

<b>Tabel II.5</b>					
<b>Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022</b>					
<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>					
<b>Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial</b>					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan		
	<b>Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten</b>		
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin	30 Orang	Pokok Pikiran
				13 Orang	Musrenbang
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM)	29 Kelompok	Pokok Pikiran
				14 Kelompok	Musrenbang
2	<b>PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>		
	<b>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial	1.211 orang	Pokok Pikiran
			Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial	511 Orang	Musrenbang
			Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial	30 Orang	Pokok Pikiran
			Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial	12 orang	Musrenbang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Bayi terlantar, anak terlantar dan disabilitas terlantar	45 Orang	Musrenbang
	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas	35 Orang	Pokok Pikiran
56 Orang				Musrenbang	
Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas			10 Orang	Musrenbang	
	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (Putus Sekolah) yang telah mengikuti pelatihan	3 Orang	Musrenbang
<b>3</b>	<b>PROGRAM : PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		
	<b>Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Persentase data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan dan pemberian bantuan sosial barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan wanita rawan sosial ekonomi ( WRSE)	45 Orang	Pokok Pikiran
				25 Orang	Musrenbang

Pada tabel II.5 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 yaitu Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Kinerja berupa Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin. Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota berupa Jumlah Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM).

Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan, indikator kinerja berupa Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial, dan Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial. Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang indikator kinerja berupa Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Bayi terlantar, anak terlantar dan disabilitas terlantar, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial indicator kinerjanya adalah ndikator kinerja adalah Jumlah Bantuan alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas, dan Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas. Sub Kegiatan : Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar indicator kinerjanya adalah Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (Putus Sekolah) yang telah mengikuti pelatihan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota, Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, indicator kinerjanya adalah Pelatihan dan pemberian bantuan sosial barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan wanita rawan sosial ekonomi ( WRSE).

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

**3.1 Indikator Kinerja**

Tabel III.1  
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72 %	74 %	IKU
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	95 %	95 %	IKU
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akip	65	65	IKU
		Nilai IRB	16,50	16,75	IKU
		Nilai IKM	85	85	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial ada 3 Sasaran yaitu Satu: Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri untuk Tahun 2022 targetnya 72 %. PMKS terdiri dari Lanjut Usia terlantar, Eks Narapidana, Disabilitas, Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Anak Terlantar dan Putus Sekolah, Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Bencana. Dua : Meningkatkan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada sasaran ini di targetkan 95 % untuk Tahun 2022 yang di Nilai Peran aktif semua PSKS yang ada yaitu PSM, TKSK, Tagana, LKS, Karang Taruna dan LK3. Tiga : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, Indikator Nilai AKIP, target tahun 2022 nilai 65, nilai IRB 16,50 dan Nilai IKM 85. Nilai ini adalah nilai dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial semula Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2022 yaitu sebanyak 5 Program, 9 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.119.773.848,-. Pada pergeseran I dan Pergeseran II tidak ada perubahan anggaran. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 sebanyak 6 Program, 11 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.501.914.205,- terjadi penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan sub kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota yaitu untuk peringatan Hari Pahlawan 10 November

Perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan						Kebanyak Saran	Prediksi Moju Rencana Tahun 2022		Perangkit Daerah Pemanggang Jawab			
						Tahun 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Sesuai	Merajadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH YANG BERKAITAN DENGAN PELENGKAPAN DASAR</b>												
1.06								16,214,276,699	5,119,773,840	3,591,914,205			16,112,408,000					
1.06.01								6,188,086,088	2,271,814,940	3,589,516,205			100 %	7,271,200,000				
1.06.01.3.01								62,888,888	14,195,800	28,888,000			100 %	72,500,000				
1.06.01.3.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %												
1.06.01.3.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, RKCR, DPA dan DPPA yang disusun			6 Dokumen	6 Dokumen	14,343,110	4,667,000	5,092,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	15,000,000	DINRS SOSIAL	
1.06.01.3.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	Jumlah Dokumen RKD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	8,767,800	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	9,000,000	DINRS SOSIAL	
1.06.01.3.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKD-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	7,764,700	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	8,000,000	DINRS SOSIAL	
1.06.01.3.01.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	7,303,300	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	8,000,000	DINRS SOSIAL	
1.06.01.3.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	6,180,200	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	7,000,000	DINRS SOSIAL	
1.06.01.3.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKRP, SIP, LKIP, DPPD, LRPD, Rencana Kerja, RKI, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMSRE, Arjab dan Capaian Kinerja SKPD			15 Dokumen	15 Dokumen	12,766,000	9,554,000	16,241,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Simua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rekrutasi, seleksi dan pengalangan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	15 Dokumen	14,000,000	DINRS SOSIAL	

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prosidian Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Seseoran	Profilisasi Maju Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.005.000	1.500.000	3.170.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	7.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	%	%	100 %	100 %	4.045.576.100	2.752.535.048	3.000.535.495						100 %	5.045.000.000		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Honorarium Penanggung Jawab Pengolah Keuangan yang dibayarkan, Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				12 Bulan 31 Orang	12 Bulan 31 Bulan	4.000.575.000	2.747.990.048	3.000.707.405	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Kalurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Keuangan	12 Bulan 31 Bulan	5.000.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/lembaga Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SRP dan Jumlah SRP kegiatan atau kegiatan terlewat				24 Dokumen	24 Dokumen	30.700.900	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Keuangan	24 Dokumen	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.515.400	2.198.000	3.190.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Keuangan	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/semester yang diinput				12 Dokumen	12 Dokumen	3.120.000	2.150.000	2.150.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Keuangan	12 Dokumen	4.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.955.000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Keuangan	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	%	100 %	100 %	5.552.000	0	0						100 %	7.000.000		
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah RKMD dan RPMD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.750.000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semas Kecamatan Semas Kabupaten	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	3.000.000	DINAS SOSIAL



Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prosidian Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Praktisan Maju Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Seseoran		Target	Pagu Indikatif
						Sesuai	Melebihi	RKPD 2022	RPMD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.01.2.05.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,700,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi (Barang Milik Daerah)	3 Dokumen	1,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Personalia Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	44,996,000	0	25,000,000							100 %	47,990,000	
1.06.01.2.05.03	Penyediaan Pelat Dinas Beserta Anlisa Kelengkapannya	Jumlah set pelat dinas besutan anlisa yang diisikan				70 Set	70 Set	35,000,000	0	25,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tertib Administrasi (Kepegawaian)	70 Set	35,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.11	Seragaman Icon Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Icon yang diisikan				2 Kall	2 Kall	8,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tertib Administrasi (Kepegawaian)	2 Kall	12,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Personalia Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	258,248,000	114,473,000	142,525,000							100 %	310,990,000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diisikan				12 Bulan	12 Bulan	11,500,000	4,107,000	4,107,000	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi (Umum)	12 Bulan	13,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan jumlah bahan alat kebidanan yang diisikan				12 Bulan	12 Bulan	32,900,000	40,895,200	40,895,100	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi (Umum)	12 Bulan	35,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	27,747,000	25,751,700	25,931,800	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi (Umum)	12 Bulan	30,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perakunan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Baku dan Sertifikat				12 Bulan	12 Bulan	8,500,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Transpor Umum-Dana Alokasi Umum, Kecamatan Sermas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi (Umum)	12 Bulan	7,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktoran Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kelompok Svarnas	Praktoran Maju Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penyelenggara Jarak		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokal	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.01.2.06.03	Rasialta Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang dilayani				400 Rori	400 Rori	36,805,000	7,000,000	4,776,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Administrasi Umum	400 Rori	35,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RK)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Jumlah potret makan minum rapat				68 Laporan 600 Potret	68 Laporan 600 Potret	109,397,000	41,254,000	58,034,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Administrasi Umum	68 Laporan 600 Potret	200,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penertakan Kemudahan Barang Milik Daerah sesuai dengan Penertarikan	%		%	100 %	100 %	529,555,000	0	0					100 %	570,000,000		
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4				2 Unit 1 unit	2 Unit 1 unit	411,125,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit 1 unit	450,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kusi Rapih Jumlah Pengadaan Kusi Tamu Jumlah Pengadaan Lemari Asap				20 buah 1 set 2 set	20 buah 1 set 2 set	34,600,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pengadaan Barang Milik Daerah	20 buah 1 set 2 set	40,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan AC Jumlah Pengadaan CCTV Jumlah Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Laptop Jumlah Pengadaan Printer Jumlah Pengadaan UPS				1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit 2 unit	1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit 2 unit	77,800,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit 2 unit	80,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penertakan Kemudahan jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	299,016,000	172,490,990	162,916,000					100 %	351,200,000		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Saat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa saat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	0	676,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,200,000	DINAS SOSIAL	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Besaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Ragu Indikatif			Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikatif		
						Sembula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	50,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pengurus Barang Pengguna Jumlah Tenaga Kontrak Bina yang dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	240,290,000	107,000,000	147,290,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	300,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perentase Barang Milik Daerah yang berondok baik	%		%	100 %	100 %	<b>968,562,000</b>	<b>216,262,000</b>	<b>216,442,000</b>					100 %	<b>968,000,000</b>		
1.06.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	300,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.00.05	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	7,000,000	8,110,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	10,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.00.09	Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Kantor				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	600,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Perentase PSES yang di Berdayakan	%		%	95 %	95 %	<b>1,276,004,000</b>	<b>1,428,598,000</b>	<b>1,451,598,000</b>					95 %	<b>1,741,200,000</b>		
1.06.02.2.01	<b>Pengembangan Potensi Sumber Keajaiban Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perentase Pengembangan Potensi Sumber Keajaiban Sosial	%		%	95 %	95 %	<b>1,276,004,000</b>	<b>1,428,598,000</b>	<b>1,451,598,000</b>					95 %	<b>1,741,200,000</b>		
1.06.02.2.00.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Peningkat Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM				01 orang	01 orang	350,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semaia Kecamatan Semaia Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Potensi Sumber Keajaiban Sosial (PSKS)	01 orang	350,000,000	DINAS SOSIAL	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK				13 orang	13 orang	125,000,000	91,000,000	93,280,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	13 orang	125,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Sosial KUBE-FM Jumlah Bantuan Sosial UEP-FM Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumlah Sosialisasi				8 Paket 76 UEP FM 24 RTLH 3 Sosialisasi	3 Paket 89 UEP FM 27 RTLH 3 Sosialisasi	1,004,147,000	961,000,000	965,940,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3 Paket 89 UEP FM 27 RTLH 3 Sosialisasi	666,208,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilihan Karang Taruna berprestasi Tingkat kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Sosialisasi/Penguatan Pengurus Pos dayu/Penguatan Dengan Lembaga Keuangan, 10 LKS, BAZNAS/Mitra Kerja Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Karang taruna				1 Kali 6 Sosialisasi 1 Sosialisasi	1 Kali 6 Sosialisasi 1 Sosialisasi	1,681,639,800	376,599,900	392,379,900	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Kali 6 Sosialisasi 1 Sosialisasi	400,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu (Kasus yang ditangani oleh LK3) Jumlah sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di bawah umur Jumlah sosialisasi tentang peran dan fungsi LK3				51 Paket 2 Angkatan 1 Kali	51 Paket 2 Angkatan 1 Kali	115,548,100	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	51 Paket 2 Angkatan 1 Kali	200,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	%		85 %	85 %	5,561,249,900	311,000,000	325,440,000						85 %	5,365,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%		%	85 %	85 %	5,124,250,000	311,000,000	325,440,000					85 %	4,820,000,000		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial				338 orang	338 orang	3,321,617,700	262,000,000	267,320,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	338 orang	3,000,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan disabilitas terlantar				30 orang	30 orang	150,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	30 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia				55 orang	55 orang	200,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	55 orang	300,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praksian Capaian Anggaran RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praksian Maju Rencana Tahun 2022		Perangkit Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Merajali	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Rehab/Rekognisi	advokasi dan pendampingan anak berkehadapan dengan hukum				40 kasus	40 kasus	266,000,000	17,000,000	37,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		40 kasus	70,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Alat Bantu Cairi Bagi penyandang disabilitas				10 orang	10 orang	650,000,000	10,000,000	17,500,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		10 orang	650,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Alokasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Monitoring dan pengajutan Klien ke Nagari- Nagari di Kecamatan				20 Orang	20 Orang	300,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		20 Orang	400,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Monitoring dan Penjangkauan Penyandang Disabilitas				15 orang	15 orang	150,000,000	15,000,000	16,500,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		15 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Rangkai Pendanaan							Kelempok Sasaran	Praktik Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Penuliharaan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.02	Keluarga Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Parit Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Parit Sosial	%	%	85 %	85 %	438,999,900	0	0					85 %	540,000,000			
1.06.04.2.02.00	Penyediaan Pembebanan						0	0	0							0 DRMAS SOSIAL		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Bantuan Psik. Mental, Psikolog. dan Sosial	Jumlah Pemberian Bantuan UEP Bagi Eja Penyandang Masalah Sosial (di NAP)			15 orang	15 orang	250,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Transfer Uraian- Dana Klokasi Uraian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		15 orang	300,000,000	DRMAS SOSIAL		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Akses ke Layanan Psikolog. dan Kesehatan Dasar	RBI JON RBI JOE Jumlah Data Revisi Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, RBI Jemberdo			176,017 jiwa	176,017 jiwa	171,999,900	0	0	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Transfer Uraian- Dana Klokasi Uraian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		176,017 jiwa	180,000,000	DRMAS SOSIAL		
1.06.04.2.02.03	Kegiatan antar Lembaga dan Organisasi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Perilaku Kebiasaan Lima Puluh Kota Jumlah Tenaga Pembina Anak Terkecil Yang Mengikuti Pelayanan Terkecil			9 Parit	9 Parit	11,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Transfer Uraian- Dana Klokasi Uraian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		9 Parit	60,000,000	DRMAS SOSIAL		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan						Kategori Sasaran	Perkiraan Mula Periode Tahun 2022		Pengaruh Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Page Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif	
						Sesuai	Merajut	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Pemeringkat Perindungan dan Jaminan Sosial	%	%		85%	85%	1,998,487,500	44,994,900	48,919,000					85%	2,200,000,000		
1.06.05.2.00	Pengelolaan Data Rahr Mislin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Rahr Mislin Cakupan Daerah Kabupaten	%	%		95%	95%	1,998,487,500	44,994,900	48,919,000					95%	2,200,000,000		
1.06.05.2.00.01	Pemutakhiran Data Rahr Mislin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)				12 Bulan	12 Bulan	496,016,100	10,000,000	20,940,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Mempertajam Efektifitas Ekosistem Untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengelolaan Data Rahr Mislin Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	700,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.00.02	Pengelolaan Data Rahr Mislin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyelenggaraan Sosial Pangan (SP) Terpadu				24.994.93PM	24.994.93PM	147,555,200	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Mempertajam Efektifitas Ekosistem Untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengelolaan Data Rahr Mislin Kabupaten Lima Puluh Kota	24.994.93PM	150,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.00.03	fasilitas Bantuan Sosial (Kategori) Keluarga	Monitoring Bantuan Sosial				12 Bulan	12 Bulan	525,462,800	13,994,000	15,970,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Mempertajam Efektifitas Ekosistem Untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengelolaan Data Rahr Mislin Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	350,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.00.04	fasilitas Bantuan Pangan bergizi Ekosistem Masyarakat	Monitoring Pemeringkat Bantuan PKK dan WGE				12 Bulan	12 Bulan	960,084,400	13,000,000	13,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Mempertajam Efektifitas Ekosistem Untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengelolaan Data Rahr Mislin Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	1,000,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Yang Tertangan	%	%		100%	100%	1,068,525,900	63,265,900	75,865,900					100%	1,110,000,000		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	%		95%	95%	824,877,500	63,265,900	75,865,900					95%	910,000,000		
1.06.06.2.01.01	Pengediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan				126 Paket	126 Paket	601,424,900	52,620,000	65,180,000	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	126 Paket	600,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.02	Pengediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang Untuk Korban Bencana				150 Paket	150 Paket	85,082,600	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Urusan, Dana Alokasi Urusan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	150 Paket	90,000,000	DINAS SOSIAL



Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sediaan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022		Paragraf Daerah Penyelenggara	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.06.2.01.04	Pengembangan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang terlantar dalam perjalanan Jumlah Pemangan Khusus Bagi Kelompok Rentan				5 orang 1 Mayor terlantar	5 orang 1 Mayor terlantar	15.400,000	6.625,000	6.625,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Deh Mansio Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kerbon Bersama Alam dan Bersama Sosial	5 orang 1 Mayor terlantar	30.000,000	DIRAS SOSIAL
1.06.06.2.01.05	Asyikan Dukungor Ptkosoid	Arsalah Penggertian Tempertasi Dgasa				30 orang	30 orang	115.000,000	4.600,000	4.600,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Deh Mansio Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kerbon Bersama Alam dan Bersama Sosial	30 orang	30.000,000	DIRAS SOSIAL
1.06.06.2.03	Pengembangan Penyediaan Masyarakat terhadap Keadapagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Penyediaan Masyarakat terhadap Keadapagaan Bencana Kabupaten/ Kota	%	%	%	95 %	95 %	183,628,488	0	0						95 %	388,000,000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Kegiatan Slaga Bencana	Jumlah Sosialisai untuk Kam pung Slaga Bencana				1 Sosialisai	1 Sosialisai	70,995,700	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Ungkungan Hidup, Meningkatkan Keabahan Bencana Dan Perubahan Hida		Masyarakat Daerah Rawan Bencana	1 Sosialisai	80,000,000	DIRAS SOSIAL
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Tenaga Slaga Bencana	Jumlah Sosialisai untuk Tenaga dan Masyarakat riwan Bencana				25 orang	25 orang	306,632,700	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Ungkungan Hidup, Meningkatkan Keabahan Bencana Dan Perubahan Hida	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Masyarakat Daerah Rawan Bencana	25 orang	120,000,000	DIRAS SOSIAL
1.06.07	<b>PROGRAM PENGELOMBAK TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Makam Pahlawan yang terkelola dengan Baik	%	%	%	95 %	95 %	348,812,488	0	18,645,000						95 %	325,000,000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	%	%	%	95 %	95 %	348,812,488	0	18,645,000						95 %	325,000,000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarna dan Pemertan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peringatan Hari Pahlawan 10 November				1 Kali Peringatan	1 Kali Peringatan	779,412,400	0	18,640,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Berkeadilan		Mitra Pahlawan dari Partipanta di Hari Pahlawan 10 November	1 Kali Peringatan	300,000,000	DIRAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	19,200,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	12 Bulan	25,000,000	DINAS SOSIAL	
<b>TOTAL</b>								<b>18,214,276,600</b>	<b>5,119,773,848</b>	<b>5,501,914,205</b>					<b>18,112,408,000</b>			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi: 1.06.000.00.00.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi: 1.06.000.00.00.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Profil Mula Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikat (Rp.)		Catatan Perkiraan	Target Capaian Kinerja		Keburukan Dana/ Paga bulanan (Rp.)			
						Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Sebelum	Target	
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum								Setelah
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1 0 6		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											5,118,775,849	5,591,814,209		18,112,408,000		
1 0 6 1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											3,273,514,949	3,590,516,309		7,371,290,900		
1 0 6 1 01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											16,191,800	25,300,000		72,500,000		
1 0 6 1 1 1	Persiapan Dokumen, Perencanaan Perangkat Daerah	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Renja, RKU, RKNP, DRK, dan DPA yang disusun	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	85 %	85 %	6,687,000	5,600,000	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000	
1 0 6 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja (SKPD)	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKRP, SP/UKR/SDP/ELU, Penjelasan Kinerja, RCU, Rencana Jln, Realisasi Rencana KSPM, PMPK, Anja dan Capaian Kinerja (SKPD)	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	85 %	85 %	13,540,000	16,341,000	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14,000,000	
1 0 6 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	85 %	1,650,000	3,320,000	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,000,000	
1 0 6 1 02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											2,752,588,849	3,098,295,905		5,845,500,000		
1 0 6 1 2 1	Persiapan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Hari-hari Pegawai yang diayatkan	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan/ 31 Orang	12 Bulan/ 31 Bulan	100 %	100 %	2,742,940,049	3,031,707,405	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,000,000,000	
1 0 6 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,148,000	2,148,000	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Pemertase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.05.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Cetakan- n- Peta- g	Praktisitas Mula Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagar Indikatif (Rp.)
						Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Subeksis	Secadiah			Subeksis	Target	
						Subeksis	Secadiah	Subeksis	Secadiah	Subeksis	Secadiah							
1.06.0.00.0.00.05.0000	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rencana/ Anggaran/ Belanja/ Anggaran SPPD	Penyusunan Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2.300.000	2.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																<b>47.500.000</b>	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Persiapan Pakan Dinas Beserta Asahut Kelengkapannya	Penyusunan Anggaran	Jumlah apel pakan khusus	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	70 Sakel	70 Sakel	100 %	100 %	0	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	<b>Administrasi Urusan Perangkat Daerah</b>																<b>114.472.000</b>	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik/Perawatan Bangunan Kantor	Penyusunan Anggaran	Jumlah Alat Listrik yang rusak	Persentase Tertib Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	4.107.000	4.107.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Anggaran	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan habis-habisnya yang dibelikan	Persentase Tertib Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	45.965.200	45.965.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Penyusunan Anggaran	Jumlah buku penyediaan barang serakan dan pengiriman	Persentase Tertib Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	25.735.700	25.931.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Fasilitasi Kunjungan Kerja	Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim yang dikirim	Persentase Tertib Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	400 Ford	400 Ford	100 %	100 %	7.000.000	3.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Penyusunan Anggaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SPPD Jumlah surat paksa minas rapor	Persentase Tertib Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Sumua Kabupaten	100 %	100 %	80 Laporan 400 Surat	80 Laporan 400 Surat	100 %	100 %	41.254.000	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Ketercapaian Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000	
1.06.0.00.0.00.05.0000	<b>Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>172.488.000</b>	
																	<b>162.970.000</b>	
																	<b>189.208.000</b>	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

Utah Organisaal : 1.96.8.000.00.00.000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisaal : 1.96.8.000.00.00.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan & Kondisi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Kelembaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Paga Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Penguji/Buwal (Rp.)
						Program		Kelembaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
1.0.0.0.0.0.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Ketepatan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.200.000	
1.0.0.0.0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan rekening telepon, listrik, air dan internet	Persentase Ketepatan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	65.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000	
1.0.0.0.0.4	Penyediaan Jasa Reboyan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honor Pengurus Bering Penggugur	Persentase Ketepatan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 5 Orang	12 Bulan 6 Orang	100 %	100 %	107.400.000	117.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100.000.000	
1.0.0.2.0.0	<b>Pemeliharaan Bawang Mili Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>											216.282.000	216.442.000			<b>968.000.000</b>		
1.0.0.0.0.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjkt, dan Peranan Kondisi dan Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjkt dan Peranan Kondisi dan Operasional Lapangan	Persentase Bawang Mili Daerah yang berproduksi baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	200.152.000	200.152.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300.000.000	
1.0.0.0.0.6	Pemeliharaan Rekrutan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rekrutan Mesin Lainnya	Persentase Bawang Mili Daerah yang berproduksi baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	7.950.000	8.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.000.000	
1.0.0.0.2	<b>PROGRAM PEMBUDIDAYAAN SOSIAL</b>											<b>1.428.599.000</b>	<b>1.451.599.000</b>			<b>1.741.200.000</b>		
1.0.0.0.2	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1.428.599.000</b>	<b>1.451.599.000</b>			<b>1.741.200.000</b>		
1.0.0.0.0.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Berwenang Kabupaten/Kota	Persentase PGRS yang di Bedyayakan	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia TKSR	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	13 orang	13 orang	95 %	95 %	91.000.000	91.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PGRS yang di Bedyayakan	95 %	125.000.000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.002.000.00.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.002.00.00.00.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/ Page Indikatif (Rp.)								
					Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah			
062333	Peningkatan Kemampuan Pemasaran Keajaiban Tanah Bersejarah Kecamatan Gunung Angin Kabupaten/Kota	Pemertua PKGS yang di Berdayakan	Lambah Bantuan Insial KBBE - HA Lambah Bantuan Sotol UEP FM Lambah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Lambah Sosialisasi	Pemertua Pengembangan Pemasaran Sumber Daya/Keajaiban Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunung Angin Kabupaten	95 %	85 %	3 Paket 76 UEP FM 34 RTLH 3 Sosialisasi	3 Paket 35 UEP FM 27 RTLH 3 Sosialisasi	95 %	85 %	961.000.000	965.940.000	Dana Bantuan Usaha-Dana Alokasi Umum	Pemertua PKGS yang di Berdayakan	95 %	664.000.000			
062334	Peningkatan Kemampuan Pemasaran Potensi Sumber Daya Keajaiban Masyarakat Kecamatan Gunung Angin Kabupaten/Kota	Pemertua PKGS yang di Berdayakan	Lambah Pemasaran Karang Taruna berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Lambah Sosialisasi/Pengantar Pemasaran Pura Daya/Keajaiban Dengan Lembaga Keagamaan, IS UKS, BAZNAS/Kitab Kajian Lambah Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna	Pemertua Pengembangan Pemasaran Sumber Daya/Keajaiban Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunung Angin Kabupaten	95 %	85 %	1 Kall 6 Sosialisasi 1 Sosialisasi	1 Kall 6 Sosialisasi 1 Sosialisasi	95 %	85 %	316.500.000	362.570.000	Dana Transfer Usaha-Dana Alokasi Umum	Pemertua PKGS yang di Berdayakan	95 %	400.000.000			
064	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>															3.168.000.000				
06401	<b>Rahablitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengawal di luar Fasilitas Sosial</b>															3.168.000.000	3.168.000.000			4.020.000.000
064011	Penyediaan Pelayanan	Pemertua Pelayanan Kelembagaan Sosial	Lambah Bantuan Rekrutasi Lulusan Terampil Lambah Teknik Potensial	Pemertua Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengawal di luar Fasilitas Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunung Angin Kabupaten	85 %	85 %	138 orang	138 orang	85 %	85 %	262.000.000	267.500.000	Dana Transfer Usaha-Dana Alokasi Umum	Pemertua Pelayanan Kelembagaan Sosial	85 %	1.000.000.000			
064014	Perbaikan Pelayanan Sosial/Kelembagaan	Pemertua Pelayanan Kelembagaan Sosial	adabaid dan Rendormping anak berkehadapan dengan Hukum	Pemertua Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengawal di luar Fasilitas Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunung Angin Kabupaten	85 %	85 %	40 kasus	40 kasus	85 %	85 %	17.000.000	17.000.000	Dana Bantuan Usaha-Dana Alokasi Umum	Pemertua Pelayanan Kelembagaan Sosial	85 %	70.000.000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

Unit Organisasi: 1.05.2.05.00.00.000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi: 1.05.2.05.00.00.000 DINAS SOSIAL

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Ceklist Pening	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)				Target			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Subelemen	Hasil Kegiatan	Subelemen	Subelemen				Subelemen		Subelemen
1641503	Pembinaan/ Stimulasi Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Penyuluhan/ pelatihan/ Alat Bantu Cerdas bagi penyandang disabilitas	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlempar, Anak Terlempar, Langit Liris Terlempar serta Galangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	85 %	85 %	10 orang	10 orang	85 %	85 %	10.800,000	17.360,000	Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	620.800,000
1641508	Pembinaan/ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Monitoring dan penjangkauan/ akses ke Negeri-Negeri di Kecamatan	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlempar, Anak Terlempar, Langit Liris Terlempar serta Galangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	85 %	85 %	20 Orang	20 Orang	85 %	85 %	7.800,000	7.800,000	Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	400.800,000
1641512	Pembinaan/ Layanan Penderita	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Monitoring dan penjangkauan/ Penyandang Disabilitas	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlempar, Anak Terlempar, Langit Liris Terlempar serta Galangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	85 %	85 %	15 orang	15 orang	85 %	85 %	15.800,000	16.900,000	Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	300.800,000
1641502	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARKOBA di Luar Panti Sosial											0	0				540.000,000
1641503	Penyediaan/ Pemeliharaan	Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARKOBA di Luar Panti Sosial		85 %	85 %			85 %	85 %	0	0		Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	0
1641505	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														2.000.000,000		
1641502	Pengumpulan Data Pokir Miskin Capaian Daerah Kabupaten/Kota														2.000.000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.000.00.00.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.000.00.00.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Cofinansi Pendaft. q	Kabrakan Maja Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikator (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kabrakan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.06.0.000.00.00.0000	Perbaikan Fasilitas Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemeliharaan dan Perindungan dan Jaminan Sosial	Monitoring Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKS)	Pemantauan Data Fasilitas Mekanik Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	95 %	95 %	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	10,000,000	10,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Perbaikan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	85 %	300,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	Monitoring Bantuan Sosial	Pemantauan Data Fasilitas Mekanik Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	85 %	85 %	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	15,894,000	15,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Perbaikan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	85 %	250,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	Radikal Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemantauan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	Monitoring Pemeliharaan Bantuan	Pemantauan Data Fasilitas Mekanik Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	85 %	85 %	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Perbaikan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	85 %	1,000,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>											83,255,800	75,905,000				3,110,800,000
1.06.0.000.00.00.0000	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>											83,255,800	75,905,000				910,800,000
1.06.0.000.00.00.0000	Penyediaan Makanan	Pemantauan Korban Bencana Yang Terjangkit	Jumlah Penyediaan Makanan	Pemantauan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	100 %	126 Paket	126 Paket	95 %	95 %	5,200,000	5,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Penyediaan Korban Bencana Yang Terjangkit	100 %	600,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	Pengangan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pemantauan Korban Bencana Yang Terjangkit	Jumlah orang terlanjar dalam pelayanan Jumlah Pengangan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pemantauan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	100 %	5 orang 1 Mayat terlanjar	5 orang 1 Mayat terlanjar	95 %	95 %	6,625,000	6,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Penyediaan Korban Bencana Yang Terjangkit	100 %	20,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	Penyediaan Dukungan Psikososial	Pemantauan Korban Bencana Yang Terjangkit	Jumlah Pengangan Transportasi Regional	Pemantauan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	100 %	30 orang	30 orang	95 %	95 %	4,000,000	4,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Penyediaan Korban Bencana Yang Terjangkit	100 %	200,000,000
1.06.0.000.00.00.0000	<b>PROGRAM PENGEDULAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>											0	18,040,000				325,800,000
1.06.0.000.00.00.0000	<b>Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>											0	18,040,000				325,800,000
1.06.0.000.00.00.0000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemantauan Makam Pahlawan yang Terlewat dengan Baik	Peringatan Hari Pahlawan 30 November	Pemantauan Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	95 %	95 %	1 Kali Peringatan	1 Kali Peringatan	95 %	95 %	0	18,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Perbaikan Makam Pahlawan yang Terlewat dengan Baik	95 %	300,000,000



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
TOTAL											5,119,773,848	5,501,914,205				18,112,408,000				

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan berpedoman kepada Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Maka setiap Perangkat Daerah di haruskan untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja nya dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan sesuai dalam perkada perubahan RKPD, yang mememuat perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja, pagu indikatif dan hal lainnya.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 02 September 2022

  
**HARMEN, SH**  
NIP. 19670816 199308 1 001